

Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Muafik¹, Nanang Agus Suyono², Susanti³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email : suyono.na07@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Tujuan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang disajikan berhubungan dengan angka dan menggunakan analisa statistik.

Hasil - Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan, akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Implikasi - Penelitian ini menggunakan data pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo..

Orisinalitas - Makalah ini melihat penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Kata kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kinerja

Pendahuluan

Menurut Siti Murniati (2020) Pemerintah Daerah sebagai organisasi nirlaba merupakan organisasi sektor publik milik pemerintah dan menempatkan organisasi ini dengan keunikan sendiri dibandingkan dengan organisasi bisnis. Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance), maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya melalui kinerja yang baik. Sehingga setiap kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Kinerja pemerintah daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat saja yang menyorotinya, namun hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manfaat yang akan diterima masyarakat

untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014).

Bastian (2006) dalam Rizki Hamdani Nst (2017) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017).

Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Wonosobo menduduki kabupaten dengan peringkat kemiskinan nomor 1, peringkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa kinerja para pemangku kepentingan di aparat pemerintah daerah Wonosobo belum bekerja secara optimal. Karna kinerja pemerintah bdaerah berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakatnya dan salah satu alat ukur kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. (Made Budi Sastra Wiguna, 2015).

Dari data kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang menduduki peringkat kemiskinan paling atas, yaitu kabupaten dengan rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah adalah kabupaten Wonosobo. Wonosobo dari tahun 1996 sampai 2019 menduduki peringkat satu dengan nilai rata-rata kemiskinan sebesar 26,44%. Peringkat ini tentunya menjadi salah satu tolak ukur kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Wonosobo yang kurang maksimal dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu salah satu penyebab yang menjadikan Wonosobo menduduki peringkat kemiskinan nomor 1 yaitu karena pengeluaran perkapita penduduk yang masih rendah. BPS Kabupaten Wonosobo mencatat bahwa pengeluaran perkapita penduduk tahun 2019 sebesar Rp 10.871.000,00 perpenduduk atau hanya Rp29.783,56 per harinya. Angka pengeluaran menggambarkan tentang pola pengeluaran rumah tangga dan dapat dijadikan ukuran mengevaluasi tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2019). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. (Made Budi Sastra Wiguna, 2015).

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

(MenPAN:2007 dalam Fifit Purnama dan Nadirsyah, 2016). Jitmau (2017) menyatakan bahwa kinerja instansi pemerintah itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Made Budi Sastra Wiguna, 2015).

Kajian Pustaka

Kinerja

Kinerja merupakan gambaran tentang pencapaian atau target, pelaksanaan program, usaha, dan kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam kelompok atau organisasi. Pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan melihat dampak penggunaan sistem informasi terhadap efektivitas penyelesaian tugas membantu meningkatkan kinerja dan menjadikan pemakainya lebih produktif dan kreatif (Chandra, 2017). Indikator penelitian kinerja menurut Mahsun (2006) dalam Said Muhamad Rifad (2019) yaitu Akuntabilitas, *Value for Money*, Kejujuran, Trasparasi dan Pengendalian.

Pengawasan

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: "Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Indikator penelitian pengawasan menurut Siswanto (2009) dalam Sopyan Badruzzaman (2018) yaitu *Accurate, Timely, Objective and Comprehesible, focus on strategic control points, Economically Realistic, organizationally realistic, Coordinated with the organization's work flow, Flexible, Prescriptive and operational dan Accepted by organization members*.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk member pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adisasmita (2011 dalam I PutuDeddySamtika Putra dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, 2021). Indikator penelitian Akuntabilitas menurut Ellwood (1993) dalam Latifah Sinaga (2017) yaitu *accountability for probity and legality, process accountability, policy accountability* dan Akuntabilitas Finansial.

Transparansi

Menurut Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto (2012) dalam Ricky ArySyahputra (2018) menjelaskan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Indikator penelitian transparansi menurut Mardiasmo (2014) yaitu: Memberikan informasi, Dokumen-dokumen yang publikasi, Selalu tepat waktu, Usulan masyarakat selalu diakomodasi, Kemudahan dalam mengakses dokumen public tentang anggaran dan Adanya system pemberian informasi kepada public.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat 1 yang dimaksud SAKD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Indikator penelitian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Tingkat kecepatan, Tingkat keamanan, Tingkat efisiensi biaya dan Tingkat kualitas hasil.

Metodologi Penelitian

Rancangan riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang disajikan berhubungan dengan angka dan menggunakan analisa statistik (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Jumlah Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang berjumlah 136 ASN. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis Non-Probability Sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling yaitu penentuan sampel dengan mengikutsertakan seluruh anggota populasi. Sehingga jumlah sampel yang mejadi responden dalam penelitian ini sebanyak 136 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo..

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.485	2.546		.191	.850
Pengawasan	.152	.052	.297	2.916	.005
Akuntabilitas	.293	.110	.279	2.663	.010
Transparansi	.174	.068	.247	2.558	.013
SAKD	.295	.125	.253	2.355	.022

Sumber: data sekunder diolah, 2021

Pengujian Hipotesis: Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh variable pengawasan (X1) terhadap variable kinerja (Y)

Variabel pengawasan (X1) memiliki nilai signifikan $0,005 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung = $2,916 > t$ tabel = $2,00324$ pada tingkat signifikansi $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variable pengawasan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap variable kinerja (Y). Artinya semakin baik penerapan pengawasan kerja maka akan semakin baik kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan asumsi variable independent lainnya bernilai sama.

Pengaruh variabel akuntabilitas (X2) terhadap variable kinerja (Y)

Variabel akuntabilitas (X2) memiliki nilai signifikan $0,010 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung = $2,663 > t$ tabel = $2,00324$ pada tingkat signifikansi $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variable akuntabilitas (X2) memiliki pengaruh positif terhadap variable kinerja (Y). Maka dari itu semakin tinggi rasa tanggungjawab yang dimiliki atas pekerjaannya akan semakin baik juga kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan asumsi variable independent lainnya bernilai sama.

Pengaruh variabel transparansi (X3) terhadap variabel kinerja (Y)

Variabel transparansi (X3) memiliki nilai signifikan $0,013 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung = $2,558 > t$ tabel = $2,00324$ pada tingkat signifikansi $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variable transparansi (X3) memiliki pengaruh positif terhadap variable kinerja (Y). Maka dari itu semakin besar rasa kejujuran dan keterbukaan pegawai akan semakin baik juga hasil kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan asumsi variable independent lainnya bernilai sama.

Pengaruh variable Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X4) terhadap variable kinerja (Y)

Variabel system akuntansi keuangan daerah (X4) memiliki nilai signifikan $0,022 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung = $2,355 > t$ tabel = $2,00324$ pada tingkat signifikansi $0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variable system akuntansi keuangan daerah (X4) memiliki pengaruh positif terhadap variable kinerja (Y). Maka dari itu semakin baik penerapan system akuntansi keuangan daerah yang diterapkan akan semakin baik juga hasil kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan asumsi variable independent lainnya bernilai sama.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja (hipotesis 1 diterima)
2. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja (hipotesis 2 diterima)
3. Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja (hipotesis 3 diterima)
4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja (hipotesis 4 diterima).

Referensi

- Cooper, R. Donald dan Emory, WilliamC. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5, Jilid 1, Erlangga: Jakarta
- Dewi SPA dan Fadjar Harimurti. 2017. *Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem I Putu Deddy Samtika Putra dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati*. 2021. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Survei Pada Opd Kabupaten Klungkung)*. Widyia Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Pebruari 2021
- Ihyaul, Ulum. 2017. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. Edisi ke-3. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144.
- Jitmau, F. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*. Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
- Latifah Sinaga. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value forMoney Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Batu Bara*. Skripsi: Program Studi S1 Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nst, Rizki Hamdani. 2017. *Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi: Program Studi S1 Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan
- Purnama, Fifit dan Nadirsyah. 2016. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1. No. 2. Halaman 01-15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/743>
- Said Muhamad Rifad. 2019. *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan*

Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi Falkutas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, Ricky Ari. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat). Skripsi. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.